

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kolonialisme yang pernah terjadi di Indonesia telah mewariskan banyak pola serta struktur, salah satunya pada bidang politik yaitu terbentuknya pemerintahan kolonial yang didalamnya terdapat sistem birokrasi. Perkembangan birokrasi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang, jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Nusantara, sudah ada negara-negara kerajaan dengan susunan pemerintahannya untuk melangsungkan sebuah tatanan bermasyarakat,¹ pada masa tersebut di nusantara terdapat berbagai negara kerajaan yang sinkretik, yang menurut Max Weber disebut negara patrimonial : masyarakat tersusun atas kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai, dimana secara ekonomi kelas yang pertama adalah yang memegang wewenang.²

Setelah itu bangsa Belanda datang dan mendirikan pemerintahan Hindia-Belanda serta diikuti dengan pembenahan sistem pemerintahan dan sejak saat itu menggunakan prinsip-prinsip birokrasi modern.³ Pemerintah Belanda mulai melaksanakan ekspedisi militer ke beberapa wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa.⁴

Sukabumi merupakan salah satu daerah yang berada di daerah Jawa Barat, yang secara administratif terbagi kedalam 2 wilayah yaitu

¹ Mohtar Masoed, *Politik birokrasi dan pembangunan*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2003), hal.71.

² Kuntowijoyo, *Agama negara dan formasi sosial*, (dalam prisma no 8,1984)

³ Samudra Wibawa, “Negara-negara di nusantara dari negara kota hingga negara bangsa,dari modernisasi hingga reformasi administrasi”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal. 21.

⁴ A.Daliman, *Sejarah Indonesia abad XIX-awal abad XX:Sistem Politik Kolonial dan Administrasi pemerintahan Hindia-Belanda*, (Yogyakarta:Ombak,2017), hal. 35.

Kotamadya dan Kabupaten. Asal muasal penamaan Sukabumi terjadi ketika Raffles yang pada waktu itu menjabat sebagai gubernur menjual beberapa tanah milik negara yang berada di wilayah Priangan, Wilayah Karawang, dan juga wilayah Semarang. Di Priangan, Sukabumi menjadi salah satu wilayah yang dijual tanahnya. Kemudian, pada tanggal 25 Januari, 1813, Dr. Andries De Wilde seorang tuan tanah membeli tanah yang berada di wilayah Sukabumi. Menurut beliau, Sukabumi merupakan tempat yang sejuk dan membuat nyaman orang yang singgah. Dan beliau mengatakan bahwa kata Sukabumi ini berasal dari bahasa sunda yaitu suka-bumen yang memiliki arti Kawasan yang mempunyai udara sejuk dan nyaman.⁵

Awalnya Sukabumi ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur tetapi ketika tahun 1871, Sukabumi kembali berubah statusnya menjadi kabupaten Sukabumi. Penetapan Sukabumi sebagai Kota Madya dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 April tahun 1914.

Seperti yang kita ketahui, Kota Sukabumi (*Gemeente Soekabumi*) diresmikan pada tahun 1914 oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan memegang status pemerintahan sipil yang otonom (*Burgerlijk Bestuur*), serta dipimpin oleh seorang walikota (*Burgemeester*), namun selama 12 tahun sejak diresmikannya Kota Sukabumi, belum ada pejabat yang diangkat sebagai *Burgemeester*. Hingga akhirnya pada tahun 1926 pemerintahan Hindia Belanda mengangkat Mr. George Francois Rambonnet sebagai *Burgemeester* Soekabumi. Tidak hanya sebagai *Burgemeester*, beliau juga merangkap jabatan sebagai sekretaris kota didampingi anggota dewan kota. Keanggotaan dewan Kota Sesuai dengan undang undang yang berlaku, terdiri dari 3 orang anggota dewan warga setempat, dan 1 orang warga keturunan Cina. Mr. Rambonnet sendiri menjabat *Burgemeester* Soekabumi sampai tahun 1934.

⁵ Herry Wiryono, dkk, *Sejarah Kota Sukabumi : Study Tentang Perkembangan Pemerintahan di Kota Sukabumi Sejak Pembentukan Sampai Kembali ke Negara Kesatuan RI*, (Bandung: Departemen kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2007), hal. 21.

Struktur pemerintahan serta perkembangan Kota Sukabumi berkembang pesat melampaui Cianjur yang sebelumnya lebih unggul dibanding Sukabumi. Tahun 1929, tatanan pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk wilayah yang termasuk ke dalam wilayah Jawa Barat berubah, kata *Preanger* diganti menjadi Priangan. Kemudian keresidenan Priangan dibagi menjadi 3 *Afdeeling*: yang pertama, *Afdeeling West-Priangan* yang ber ibukota di Sukabumi, kedua ada *Midden-Priangan* yang ber ibukota di Bandung, dan yang terakhir ada *Oost-Priangan* yang ber ibukota di Tasikmalaya.⁶ Dari awal peresmian status *Gemeente* Soekabumi hingga sekarang, Sukabumi mengalami beberapa pergantian atau perubahan nama. Hingga pada akhirnya kota Sukabumi menjadi nama resmi sesuai UU No.32 tahun 2003.

Perkembangan perekonomian yang pesat terjadi di Sukabumi setelah percobaan penanaman tanaman ekspor yang dilakukan oleh orang Belanda, mereka pertama kali mencoba menanam tanaman kopi di daerah Sukabumi, ternyata hasil dari percobaannya ini sangat bagus, kopi yang ditanam tumbuh lebat di tanah Sukabumi, kopi yang diekspor dari Sukabumi ini memiliki kualitas kopi yang sangat bagus hingga terkenal di mancanegara, dari situ banyak pengusaha-pengusaha Eropa yang tertarik untuk berinvestasi dan membuka lahan perkebunan di Sukabumi.

Selain kopi, orang-orang Belanda juga mencoba menanam dan membudidayakan teh di Sukabumi, ternyata hasilnya lebih bagus dari tanaman kopi, semakin lama semakin banyak perkebunan teh yang berada di Sukabumi, tanaman teh ini yang nantinya menjadi komoditi utama dalam proses perdagangan ekspor. Karena semakin banyaknya hasil perkebunan yang dihasilkan di Sukabumi, maka pemerintah Hindia Belanda pun melakukan berbagai pembangunan yang bisa memudahkan transportasi

⁶ Asep Mukhtar Mawardi, *Citra Kota Sukabumi Dalam Arsip*, (Jakarta:ANRI,2013), hal. 3.

menuju Sukabumi. hal ini berdampak pada semakin majunya perekonomian di wilayah Sukabumi.

Perlu diketahui, Sukabumi merupakan salah satu wilayah dimana penduduknya mayoritas beragama Islam. Bisa dibuktikan dengan banyaknya bangunan Masjid yang terletak di wilayah Sukabumi serta meningkatnya pembangunan pesantren yang terjadi di Sukabumi.⁷Tetapi tidak hanya agama Islam, di Sukabumi juga terdapat masyarakat yang beragama lain seperti Kristen dan Konghucu dengan ditandai adanya tempat peribadatan mereka. Walaupun terdapat beberapa agama yang berbeda, tidak menjadi penghalang bagi masyarakatnya untuk hidup rukun.

Beragamnya masyarakat yang tinggal di Sukabumi, tidak menutup kemungkinan terjadinya akulturasi budaya yang beragam juga, tetapi hal ini tidak menjadi penyebab perselisihan dalam masyarakat, walaupun pada awalnya memang terjadi diskriminasi yang dilakukan antar kalangan, hal itu masih bisa dianggap wajar karena memang tidak mudah ketika tiba-tiba diharuskan untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda budaya bahkan agamanya.

Kota Sukabumi yang menjadi kota transit yang menarik dan nyaman ini dengan perkembangan nya yang bisa dibilang pesat, serta banyaknya historis yang melekat di kota ini, namun sampai saat ini masih sedikit penulisan mengenai kota ini. Hal ini yang menumbuhkan rasa penasaran dan menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada kondisi Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan Rambonnet sebagai *Burgemeester* Pertama dengan mengambil judul ‘Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan Burgemeester G.F.Rambonnet (1926-1934)’ alasan pemilihan rentang tahun ini karna periode kepemimpinan Rambonnet sebagai *Burgemeester* Kota Sukabumi itu dari tahun 1924-1936.

⁷ Annisa Fajarani, “Peranan Pergoeroean Sjamsoel Oeloem dalam Mempetahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sukabumi (1945- 1946)”, (Yogyakarta: Skripsi sarjana Universitas Yogyakarta, 2012), hal. 29.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka munculah permasalahan sebagai pemandu dalam penelitian ini, yang akan dituangkan dalam beberapa poin dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemerintahan dan kondisi sosial politik Sukabumi masa kolonial?
2. Bagaimana Sistem Pemerintahan Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan *Burgemeester* G.F.Rambonnet (1926-1934)?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah.

1. Mengetahui sistem pemerintahan dan kondisi sosial politik Sukabumi masa kolonial?
3. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan *Burgemeester* G.F.Rambonnet (1926-1934)

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Sukabumi masa kolonial memang sebenarnya sudah banyak diteliti. Baik berupa artikel jurnal, skripsi, tesis ataupun buku. Namun, tentunya pada setiap tulisan tersebut terdapat perbedaan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seperti topik yang penulis ambil dalam pembahasan kali ini sangat berbeda dengan para peneliti sebelumnya. Penulis kali ini akan membahas mengenai Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan burgemeester G.F.Rambonnet dari tahun 1926-1934, dimana penulis hanya memfokuskan kondisi Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan burgemeester Rambonnet sebagai Walikota pertama Kota Sukabumi.

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Setia Nugraha dengan judul 'Kota Sukabumi : dari distrik menjadi Gemeente (1815-1914)' di publish pada jurnal PATANJALA Vol.9 No.3 tahun 2017.

Artikel ini berisi tentang tahapan atau proses perubahan status kota sukabumi dari distrik menjadi gemeente, dan pada artikel ini juga dibahas apa yang menjadi pertimbangan perubahan status kota sukabumi tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada artikel ini membahas Kota Sukabumi sebelum menjadi gemeente, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah ketika Kota Sukabumi status nya sudah menjadi Gemeente.

2. Skripsi Khosiatin Muyassaroh dengan judul ‘Tata ruang Kawasan Kota Jember Tahun 1819-1929’ mahasiswi lulusan UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2023. Skripsi ini berisi tentang tata ruang Kawasan Kota Jember pada masa kolonial Belanda. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada skripsi ini hanya berfokus kepada tata ruang kota sedangkan yang akan penulis teliti tidak hanya dari tata ruang kota saja, tetapi dari kondisi yang lain.
3. Skripsi Mashuroeni dengan judul ‘Garut pada masa kepemimpinan bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa (1915-1929)’ mahasiswi lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada skripsi ini berisi gambaran umum garut pada masa kolonial dan terfokus pada masa kepemimpinan bupati R.A.A. Soeria Kertalegawa. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam objek tempat dan tokoh yang ditelitinya.
4. Skripsi Jujun Kurniawan dengan judul ‘Perkembangan Kota Malang 1914-1942: kajian atas intervensi pemerintah kolonial Hindia Belanda’ mahasiswa lulusan Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Pada skripsi ini berisi tentang kondisi geografis dan perkembangan Kota Malang serta perubahan administrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam objek tempat yang dikaji nya.

5. Artikel jurnal yang berjudul ‘Modernisasi:Sukabumi dalam arus perubahan sosial ekonomi era kolonial Belanda’ yang ditulis oleh Dimas Aldi Pangestu dan Zulkarnain, di publish dalam jurnal ISTORIA Vol.16 No.2 tahun 2020. Artikel ini berisi tentang perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sukabumi pada masa kolonial Belanda.Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis tidak hanya berfokus pada perubahan sosial ekonomi saja.

E. Metodologi Penelitian

Disini penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dimana metode penelitian sejarah ini merupakan seperangkat aturan yang sistematis agar bisa mengumpulkan sumber sejarah dengan efektif,dan menilainya secara kritis.⁸ Ada beberapa tahapan dalam metode penelitian sejarah, yang pertama ada tahapan Heuristik dimana pada tahapan ini penulis melakukan pencarian sumber atau pengumpulan sumber yang akan digunakan dalam penelitiannya. Tahapan kedua adalah kritik,tahapan kritik ini bertujuan untuk mengkritisi sumber yang sudah didapatkan sehingga sumber tersebut bisa dipercaya keotentikan dan kredibilitasnya. Tahapan ketiga adalah interpretasi, tahapan ini merupakan tahapan penafsiran kembali yang dilakukan oleh penulis terhadap sumber yang sudah didapatkan, tahapan yang keempat adalah tahapan Historiografi, pada tahapan ini penulis melakukan penulisan hasil yang diperoleh sesuai data atau sumber yang sudah didapatkan pada tahapan sebelumnya.

1. Heuristik

Tahapan ini merupakan tahapan pencarian sumber, dimana penulis mencari sumber sumber yang berhubungan dengan tema yang ditelitinya. Tahapan heuristik ini merupakan kegiatan mengumpulkan serta menemukan sumber sejarah yang tersebar dan teridentifikasi⁹

⁸ Dudung Abdurrahman, *metode penelitian sejarah*, (Jakarta: logis wacana ilmu,1999),hal. 43-44.

⁹ Suhartono w.pranoto, *teori dan metodologi sejarah*,(Yogyakarta: Graha ilmu,2010),hal. 29.

1) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari pelaku sejarah ataupun saksi mata yang sezaman. Pada penelitian kali ini penulis menggunakan sumber primer berupa arsip dokumen, foto dan koran yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Arsip dokumen

- a. *Regeerings almanak* 1926
- b. *Staatsblad* No.371 tahun 1926
- c. *Besluit* 18 Juni 1915 No.37
- d. *Staatsblad* tahun 1914 No.310

2. Foto

- a. *25 Jaren decentralisatie in Nederlandsch-indie, 1905/1930*

3. Koran

- a. *Bataviaasch nieuwsblad* 17-05-1926
- b. *De Indische Courant* 01-06-1926
- c. *Bataviaasch nieuwsblad* 17-01-1931
- d. *Bataviaasch nieuwsblad* 12-09-1933
- e. *Bataviaasch nieuwsblad* 15-03-1934
- f. *Soerabaijasch handelsblad* 10-01-1935
- g. *Algemeen Handelsblad* 19-11-1945

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berasal bukan dari pelaku ataupun saksi sejarah yang sezaman. Disini penulis menggunakan sumber tertulis berupa buku dan artikel jurnal

1. Buku

- a. Sejarah Sukabumi karya Ruyatna jaya
- b. Soekaboemi the untold story karya Irman Firmansyah

2. Artikel jurnal

- a. Setia nugraha. (2017). Kota Sukabumi : dari distrik menjadi *Gemeente* (1815-1914)

- b. Dimas aldi pangestu, Zulkarnain. (2020). Modernisasi:Sukabumi dalam arus perubahan sosial ekonomi era kolonial Belanda.

2. Kritik

Tahapan kritik ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kredibilitas dan keotentikan dari sumber-sumber yang telah didapatkan pada tahapan sebelumnya.¹⁰

1) Kritik ekstern

Merupakan tahapan kritik dengan cara melihat otentisitas sumber tersebut dari aspek luarnya. Biasanya dilihat dari jenis kertas nya, bahan tinta, gaya Bahasa, jenis huruf, dan sebagainya yang bisa dilihat secara langsung.

1. Arsip dokumen

a. *Regeerings almanak* 1926

Kertas nya sudah sedikit menguning, karena memang sudah lama, terdapat beberapa noda mungkin karena sudah lama disimpan tetapi noda tersebut tidak mengganggu tulisan/isi yang terdapat didalamnya. Kondisi fisik nya masih utuh tidak ada yang sobek, tinta nya masih bagus, menggunakan Bahasa Belanda, masih bisa dilihat dan dibaca dengan jelas.

b. *Staatsblad* No.371 tahun 1926

Kertas nya sudah sedikit menguning,karena memang sudah lama disimpan, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya masih sangat bagus dan jelas untuk dibaca, kondisi fisik nya masih utuh,tidak ada yang sobek, tinta nya masih bagus. Kondisi fisik nya bagus dan terawat

¹⁰ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 90

dengan baik, walaupun sudah lama sejak masa pembuatannya

c. *Besluit* 18 Juni 1915 No.37

Kertas nya sudah menguning, terdapat beberapa noda mungkin karena sudah lama disimpan tetapi noda tersebut tidak mengganggu tulisan/isi yang terdapat didalamnya. Kondisi fisik nya masih utuh tidak ada yang sobek, tinta nya sudah sedikit pudar, dan menyebabkan beberapa tulisan tidak terlalu jelas untuk dibaca, tetapi mayoritas masih bisa dilihat dan diamati dengan baik, menggunakan Bahasa Belanda.

d. *Staatsblad* tahun 1914 No.310

Kertas nya sudah sedikit menguning, terdapat beberapa noda mungkin karena sudah lama disimpan tetapi noda tersebut tidak mengganggu tulisan/isi yang terdapat didalamnya. Kondisi fisik nya masih utuh tidak ada yang sobek, tinta nya sudah sedikit pudar, menggunakan Bahasa Belanda.

2. Foto

a. 25 *Jaren decentralisatie in Nederlandsch-indie*, 1905/1930

Foto ini tidak berwarna/hitam putih, kondisi nya masih sangat bagus, utuh, dan jelas untuk dilihat.

3. Koran

a. *Bataviaasch nieuwsblad* 17-05-1926

Warna kertas nya kuning, khas kertas yang sudah lama, Bahasa nya menggunakan Bahasa Belanda, tinta nya menggunakan tinta berwarna hitam dan kondisi nya masih bagus, terlihat jelas, sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

b. *De Indische Courant* 01-06-1926

Warna kertas nya kuning, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya menggunakan tinta berwarna hitam dan kondisinya masih bagus, terlihat jelas, sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

c. *Bataviaasch nieuwsblad* 17-01-1931

kertas nya berwarna putih, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya menggunakan tinta berwarna hitam dan kondisinya masih sangat bagus dan terlihat sangat jelas sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

d. *Bataviaasch nieuwsblad* 12-09-1933

kertas nya berwarna putih, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya menggunakan tinta berwarna hitam dan kondisinya masih sangat bagus dan terlihat sangat jelas sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

e. *Bataviaasch nieuwsblad* 15-03-1934

kertas nya berwarna putih, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya masih terlihat sangat jelas sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

f. *Soerabaijasch handelsblad* 10-01-1935

kertas nya berwarna putih, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya menggunakan tinta berwarna hitam dan kondisinya masih sangat bagus dan terlihat sangat jelas sehingga masih sangat layak untuk dibaca.

g. *Algemeen Handelsblad* 19-11-1945

Kertas yang digunakan terlihat berwarna kuning, menggunakan Bahasa Belanda, tintanya menggunakan tinta

berwarna hitam dan kondisinya masih sangat bagus dan masih berwarna hitam pekat, sangat jelas untuk dibaca.

2) Kritik Intern

Tahapan kritik intern ini bertujuan untuk mengetahui kredibilitas atau keabsahan dari sumber yang sudah didapat pada tahapan sebelumnya.¹¹

1. Arsip dokumen

a. *Regeerings almanak* 1926

Dokumen ini berisi tentang susunan dewan Kota Sukabumi tahun 1926 dimana pada dokumen ini tertulis Mr. G.F.Rambonnet menjabat sebagai *Burgemeester* dan *Secretaris* dengan susunan dewan kota yang menjabat pada saat itu diantaranya ada Dr.M.C.Blijham, B.E.S.Brender A Brandis, Mr.J.A.Leden, K.Dijkema, Raden Djajakoesoema, P.J.J.Hamilton, W.Z.Marcella J.H.Moejon, Oeij Djin Tjiang, Raden Sadeli, dan Raden Demang Karnabrata, ini merupakan susunan dewan kota *Gemeenteraad van Soekaboemi*, selain susunan dewan Kota Sukabumi, terdapat juga susunan dewan kota daerah lain seperti dewan Kota Buitenzorg, dewan Kota Bandung

b. *Staatsblad* No.371 tahun 1926

Dokumen ini berisi tentang penunjukan *Gemeente* Soekaboemi sebagai institusi otonom, yaitu pengaturan keuangan yang diatur oleh daerahnya sendiri, dan pemisahan keuangan dari kas umum pemerintah Hindia Belanda.

¹¹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 91

c. *Besluit* 18 Juni 1915 No.37

Dokumen ini berisi surat keputusan mengenai pembentukan *onderafdeeling* Soekabumi menjadi daerah otonom dengan menyanggah status Kotapraja (*Bugeljikbestuur* atau pemerintahan sipil yang dipimpin oleh seorang *Burgemeester* atau walikota).

d. *Staatsblad* tahun 1914 No.310

Dokumen ini berisi tentang peraturan desentralisasi yang menetapkan *afdeeling* Soekabumi menjadi Kota Sukabumi yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 1914 sebagaimana dimuat pada pasal sepuluh.

2. Foto

a. *25 Jaren decentralisatie in Nederlandsch-indie*, 1905/1930

Foto ini merupakan foto yang menunjukkan perbaikan jalan yang berada di depan stasiun kereta api Kota Sukabumi,

3. Koran

a. *Bataviaasch nieuwsblad* 17-05-1926

Koran ini berisi tentang berita pelantikan Mr. G.F.Rambonnet sebagai walikota Kota Sukabumi pada tanggal 7 Juni 1926.yang dihadiri oleh beberapa tamu undangan salah satunya adalah Residen West Priangan yaitu J.D.de Vries

b. *De Indische Courant* 01-06-1926

koran ini berisi tentang berita pelantikan Mr.G.F.Rambonnet sebagai walikota Kota Sukabumi.

c. *Bataviaasch nieuwsblad 17-01-1931*

Koran ini berisi tentang pembukaan bangunan baru sekolah H.C.S Soekaboemi yang dibangun pada masa pemerintahan walikota Rambonnet dan dibuka langsung oleh walikota, disini disebutkan bahwa Rambonnet juga berpidato dan mengucapkan selamat atas pembangunan tersebut, dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada kepala sekolah yang kebetulan pada hari itu sedang berulang tahun.

d. *Bataviaasch nieuwsblad 12-09-1933*

Koran ini berisi tentang berita pembangunan balai kota yang dilakukan pada masa pemerintahan walikota Rambonnet, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Rambonnet.

e. *Bataviaasch nieuwsblad 15-03-1934*

Koran ini berisi tentang berita acara perpisahan walikota Rambonnet, didalamnya dipaparkan bahwa acara tersebut dihadiri oleh para dewan kota serta para perwakilan dari tiap kalangan dan mereka melakukan pidato yang berisi tentang kesan pesan selama bekerja sama dengan Rambonnet di Sukabumi. Mereka juga mengucapkan kata perpisahan kepada Rambonnet. dewan kota memberikan cendramata sebagai kenang-kenangan untuk Rambonnet, terakhir pidato dari ibu Anita Rambonnet dan dari G.F.Rambonnet sendiri, ia mengucapkan terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir pada acara tersebut, dan mengatakan sangat berat hati untuk meninggalkan Kota Sukabumi, untuk itu ia akan

tetap terus memantau pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya.

f. *Soerabaijasch handelsblad 10-01-1935*

Koran ini berisi tentang pemeriksaan pemeriksaan Rambonnet sebagai mantan walikota Soekaboemi mengenai beberapa rumor pada akhir masa pemerintahannya, dan dalam berita koran ini juga disebutkan bahwa kurang tersusunnya pemberkasan atau arsip pada masa pemerintahan Rambonnet. sehingga pemerintah selanjutnya sulit untuk mendapatkan data-data administrasi sebelumnya, dan harus mencari serta menyusunnya dari awal.

g. *Algemeen Handelsblad 19-11-1945*

Koran isi berisi berita tentang kematian Rambonnet yang dikabarkan oleh salah satu keluarga nya yang berada di Belanda. Rambonnet dikabarkan meninggal di Cimahi dengan penyebab kematian karena kelelahan pada bulan Februari tahun 1945, meninggal dunia pada usia 57 tahun. Dalam koran ini juga disebutkan setelah meninggalnya Rambonnet, istri Bersama anak perempuannya pergi ke Belanda dan tinggal menetap disana. Sedangkan anak laki-lakinya yang bekerja di Angkatan laut Belanda dan menjadi tawanan perang Jepang belum ada kabarnya.

3. Interpretasi

Tahapan ini merupakan tahapan penafsiran Kembali oleh penulis tentang fakta fakta sejarah yang telah ditemukan. Penulis sebisa mungkin untuk mengurangi unsur subjektivitas. Tahapan interpretasi ini bisa juga disebut dengan analisis sejarah. Analisis memiliki arti menguraikan, dan analisis sejarah ini bertujuan untuk menyatukan fakta

fakta yang didapatkan dari sumber sumber sejarah dengan memasukan teori teori yang kemudian disusunlah fakta fakta tersebut kedalam suatu interpretasi yang utuh¹²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepemimpinan menurut Max Weber yang membedakan kepemimpinan secara umum kedalam tiga jenis otoritas, yaitu : otoritas Karismatik, otoritas Tradisional, dan otoritas legal-rasional. Yang menjadi pusat perhatian dari Max Weber adalah persoalan mengenai apakah yang membuat orang orang mematuhi perintah dan mau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.¹³

Max Weber menggolongkan ada tiga jenis otoritas :

1. Otoritas karismatik

Dalam tipe ini, orang-orang bersedia untuk menaati atau mematuhi sebuah kepemimpinan tertentu atas dasar keyakinan mereka akan kharisma atau wibawa yang dimiliki oleh sang pemimpin. Karena kharisma atau wibawa itu diyakini bersumber dari kekuatan yang sakral, maka tidak sembarang orang yang bisa mendapatkannya. Jadi, seorang yang memilikinya akan dianggap sebagai pertanda bahwa dia telah memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin mereka. Kepemimpinan di sini dibangun di atas landasan keyakinan orang-orang akan kesakralan sang pemimpin yang tak boleh dipertanyakan.¹⁴

Ciri dari otoritas kharismatik ini adalah dipilih dengan alasan memiliki kepribadian yang dinamis, disahkan karena kemenangan dan kesuksesan bagi komunitas, loyalitasnya berbentuk kesetiaan dan pengabdian interpersonal dan pribadi, dan kepemimpinannya berupa penguasa dan pengikut (murid).

¹² Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hal. 111.

¹³ Mas'ud Said, "Birokrasi Indonesia", <https://pemerintahan.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 28 November 2023 pukul 19.00 WIB

¹⁴ M.Sulhan, Zulkipli Lessy, "otoritas dan dakwah tuan guru pada masyarakat Lombok : Studi analisis teori sosial 'otoritas' Max Weber" , (*Jurnal an-nawa* , Vol.04 No.02, 2022)

2. Otoritas tradisional

Dalam tipe otoritas yang kedua ini, ketaatan dan kepatuhan orang-orang didasarkan pada adat kebiasaan yang telah dijalankan secara generasi bergenerasi. Kesetiaan pada adat kebiasaan menjadi nilai yang diutamakan. Di sini, sang pemimpin mendapatkan legitimasinya sebagai seorang pemimpin karena perannya sebagai penjaga dan penerus tradisi. Ciri dari otoritas tradisional ini adalah : dipilih atas dasar kepribadiannya yang dominan, posisi nya ditentukan oleh tradisi atau rutinitas yang mapan, diperintah menggunakan kualitas yang diperoleh atau diwariskan, disahkan oleh tradisi atau rutinitas yang mapan, loyalitasnya berdasarkan kesetiaan tradisional.

3. Otoritas legal-rasional

Pada tipe otoritas yang ketiga ini, kepatuhan dan kesediaan orang-orang lebih didasarkan pada aturan-aturan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip dan cara-cara rasional. Di sini, bukan karisma pemimpin atau adat kebiasaan yang menjadi dasar ketaatan, namun hukum-hukum yang dibentuk secara tertulis dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Ciri dari otoritas legal-rasional ini adalah : dipilih oleh atasan fungsional atau pejabat birokrasi, posisi ditentukan oleh otoritas yang didirikan secara hukum, diperintah menggunakan norma, dekrit, dan peraturan dan regulasi lainnya yang ditetapkan secara rasional, disahkan melalui kepercayaan umum pada kebenaran formal aturan-aturan ini dan mereka yang memberlakukannya dianggap sebagai otoritas yang sah, loyalitasnya untuk otoritas atau aturan, dan memimpin berdasarkan aturan, bukan penguasa.¹⁵

¹⁵ M.Sulhan, Zulkipli Lessy, "otoritas dan dakwah tuan guru pada masyarakat Lombok : Studi analisis teori sosial 'otoritas' Max Weber" , (*Jurnal an-nawa* , Vol.04 No.02, 2022)

Rambonnet dipilih sebagai *Burgemeester* tentunya melalui beberapa tahapan seleksi, dan teori ini digunakan untuk membantu memudahkan dalam mencari apa yang menjadi alasan sehingga Rambonnet bisa dipilih dan bersedia untuk menjadi *Burgemeester*.

4. Historiografi

Pada tahapan ini merupakan tahapan utama dari tahapan tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahapan ini penulis menuliskan semua data yang sudah diperoleh, setelah melalui tahap kritik ekstern dan intern serta tahap interpretasi yang penulis lakukan dan menggunakan teori-teori yang relevan untuk mendukung penulisan penelitian ini.¹⁶

Pada penelitian ini penulis penyusunnya dalam 4 bab yaitu :

1. BAB I : Merupakan Bab awal dari penulisan penelitian ini. Bab 1 ini memuat Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah pemilihan topik oleh penulis yang mendasar kepada kemampuan penulis serta secara finansial dan waktu yang dapat dijangkau oleh penulis. Selanjutnya terdapat Rumusan Masalah sebagai pembatas penelitian agar bisa fokus dan terarah, setelahnya ada Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kajian Pustaka yang memuat hasil karya ilmiah atau skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan yang terakhir ada Metodologi Penelitian, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah, dimana dalam metode sejarah ini terdapat empat tahapan, tahapan yang pertama yaitu Heuristik (pengumpulan atau pencarian sumber), tahapan kedua ada kritik ekstern dan intern (untuk menguji keotentikan dan kredibilitas sumber),

¹⁶ Dudung Abdurrahman, *metode penelitian sejarah*, (Jakarta: logis wacana ilmu, 1999), hal. 110.

tahapan ketiga ada interpretasi (penafsiran), dan yang terakhir ada tahapan Historiografi (penulisan).

2. BAB II : Pembahasan, membahas mengenai sistem pemerintahan dan kondisi sosial politik Sukabumi masa kolonial, pada bab ini terdapat tiga sub bab yaitu : sistem pemerintahan dan Birokrasi pada masa kolonial dibahas mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia terutama pada masa kolonial, bagaimana dan apa saja perubahan yang terjadi, selanjutnya sub bab mengenai kondisi sosial politik sukabumi masa kolonial, pada bagian ini lebih difokuskan pada bagaimana kondisi yang terjadi di Sukabumi baik itu kondisi sosial maupun kondisi politik saat terjadi kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Belanda, sub bab yang terakhir mengenai latar belakang Rambonnet
3. BAB III : Pembahasan, membahas mengenai kondisi Kota Sukabumi pada masa kepemimpinan *burgemeester* G.F.Rambonnet (1926-1934), pada bab ini terdapat tiga sub bab. Pada bab tiga ini, pembahasannya lebih terperinci dan lebih tefokus pada masa kepemimpinan *burgemeester* Rambonnet di Kota Sukabumi, terdapat tiga sub-bab Sub bab pertama membahas mengenai kondisi sosial ekonomi Kota Sukabumi pada masa *burgemeester* Rambonnet, disini dibahas mengenai apa saja upaya yang dilakukan oleh Rambonnet untuk lebih mensejahterakan perekonomian Kota Sukabumi,
Sub bab yang kedua, membahas mengenai kondisi keagamaan Kota Sukabumi pada masa *burgemeester* Rambonnet,
Sub bab ketiga membahas mengenai sistem pemerintahan Kota Sukabumi pada masa *burgemeester* G.F.Rambonnet,

pembahasan mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Rambonnet di Kota Sukabumi, siapa saja Dewan Kota yang bertugas, dan apa saja kebijakan yang diberlakukan oleh Rambonnet pada saat menjadi *burgemeester* Sukabumi.

4. BAB IV : penutup yang berisi kesimpulan dan saran

